

Efektivitas pelaksanaan kebijakan sistem kelas tuntas berkelanjutan di kabupaten Gowa

Ahmad Harakan.

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Makassar.

ahmad.harakan@unismuh.ac.id

Abstract

Education becomes complicated problems of the nation, the implementation of the teaching and learning process requires output at improving the quality of human development. Responding to the current educational facts, the Gowa local government policies to innovate to present Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan. By using a qualitative approach and type of phenomenology, and descriptive. Interviews and direct observation in data collection has answered problems related to the effectiveness of education policies sector and implemented by the Local Government of Gowa. Innovative and creative, support and satisfaction of the people, as well as the maximal of implementation of the policy be an indicator of the effectiveness of policies initiated by the Local Government of Gowa

Keyword: Effectiveness, Policy, Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan.

Abstraksi

Pendidikan menjadi persoalan pelik bangsa, pelaksanaan proses belajar mengajar menuntut output pada peningkatan kualitas pembangunan manusia. Merespon fakta pendidikan saat ini, maka Pemerintah Kabupaten Gowa berinovasi menghadirkan kebijakan sistem kelas tuntas berkelanjutan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan tipe fenomenologi, serta bersifat deskriptif. Wawancara dan observasi langsung dalam pengumpulan data telah menjawab masalah terkait efektivitas pelaksanaan kebijakan unggulan sektor pendidikan yang dihadirkan serta diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa. Kebijakan yang inovatif dan kreatif, dukungan dan kepuasan masyarakat, serta maksimalnya implementasi kebijakan menjadi indikator efektivitas pelaksanaan kebijakan sistem kelas tuntas berkelanjutan yang diprakarsai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa.

Kata Kunci: Efektivitas, Kebijakan, Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan.

<i>Submite</i>	: 18 Nov 2016
<i>Review</i>	: 20 Nov 2016
<i>Accepted</i>	: 01 Jan 2017
<i>Surel Corespondensi</i>	: audra.jovani@uki.ac.id / adamhilman@umpo.ac.id

Pendahuluan

Mendiskusikan pendidikan dalam ranah kebijakan merupakan persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah dan masyarakat. Dari aspek sosial masyarakat, pendidikan berarti pewarisan kebudayaan dari generasi tua kepada generasi muda, agar kehidupan masyarakat tetap berkelanjutan, atau dengan kata lain masyarakat mempunyai nilai budaya yang disalurkan kepada generasi muda.

Ditinjau dari aspek individu, pendidikan berarti pengembangan potensi-potensi yang terpendam dan tersembunyi, dan diangkat untuk dipoles agar mengkilap dan bersinar menyinari kegelapan manusia (Langgulung, 1987). Transfer wawasan dan pengetahuan yang dimaknai sebagai komponen peningkatan kualitas manusia dan perwujudan lingkungan kritis, solutif, dan positif adalah *Magnum Opus* peradaban suatu bangsa.

Politik dan kekuasaan suatu negara memegang kunci keberhasilan pendidikan. Dalam konteks pembangunan demokratisasi dan desentralisasi di Indonesia (Sarnoto, 2012). Khusus di Indonesia, isu sentral yang berkembang dewasa ini dalam bidang pendidikan adalah masalah rendahnya mutu pendidikan (Mustari, 2011). Sehingga penyelesaian masalah pendidikan sangat memerlukan keterlibatan pemerintah yang notabene merupakan bagian dari politik dan kekuasaan.

Merespon permasalahan tersebut, kabinet telah mengeluarkan paket reformasi pendidikan menyeluruh yang dirancang untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas. Komponen utama proses reformasi tersebut adalah pelimpahan tanggung jawab pendidikan dasar kepada sekolah-sekolah dan pemerintah di daerah (Al-Samarrai, 2013). Dengan dikeluarkannya paket reformasi pendidikan, dimana pelimpahan tanggung jawab pendidikan dasar yaitu Pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan diberikan kepada sekolah dan pemerintah daerah juga merupakan penegasan Pemerintah Pusat atas upaya pemerataan peningkatan kualitas pendidikan dan kualitas anak didik di seluruh Indonesia.

Pemerintah Daerah yang senantiasa bersinergi dengan sekolah dituntut menghadirkan kebijakan inovatif, kreatif dan implementatif dalam mewujudkan tujuan paket reformasi pendidikan. Sudah seharusnya pemerintah tidak lagi berada pada wilayah abu-abu, melaksanakan kegiatan pendidikan hanya sebatas tugas normatif, akan tetapi sudah perlu mewujudkan proses kegiatan pendidikan yang berbobot dan hasil yang sesuai dengan tujuan pelaksanaan pendidikan.

Bentuk perwujudan dan respon positif atas hadirnya paket reformasi pendidikan, maka Pemerintah Kabupaten Gowa mengeluarkan kebijakan di bidang pendidikan yaitu Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan. Sebagai mana hasil Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gowa, 15 Juli 2016, kebijakan ini mulai disosialisasikan pada tahun 2011 dibawah kepemimpinan Ichsan Yasin Limpo, dan mulai dilaksanakan pada tahun

2012, lalu pada tahun 2013, kebijakan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Gowa nomor 10 tahun 2013 tentang Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB). Kini dibawah kepemimpinan Adnan Purictha Ichsan Yasin Limpo pelaksanaannya telah merata disetiap tingkatan pendidikan dasar, mulai SD, SMP, hingga SMA/SMK di Kabupaten Gowa. Hadirnya kebijakan ini tidak lepas dari perdebatan dan pertimbangan untuk memajukan kualitas pendidikan dan memenuhi hak masyarakat untuk mengakses pendidikan dengan mudah.

Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan sebagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Gowa di bidang pendidikan, menitikberatkan pada transfer ilmu dan pengetahuan secara komprehensif dan tuntas kepada setiap peserta yang mengikuti pembelajaran dan pendidikan, menempatkan peserta didik sebagai subjek bukan sebagai objek dalam proses belajar mengajar, dan memberikan pengalaman belajar yang mampu mengembangkan potensi anak didik secara maksimal sehingga menghasilkan insan yang produktif.

Kajian mengenai kebijakan pendidikan masih sebatas pada tema budaya mutu pendidikan (Basri, 2011), peningkatan mutu pendidik (Mustari, 2011), permasalahan pada guru dalam kaitannya dalam proses sertifikasi dan kualitas pengajaran (Malik, 2011), pengaruh politik dalam pendidikan dan penentuan kebijakan (Purwanto, 2008) dan Konsepsi politik pendidikan (Sarnoto, 2012). Adapun secara khusus mengenai kajian Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan masih sebatas pada Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan sebagai sebuah inovasi dari Pemerintah daerah (Syamsuddin, 2015), dan evaluasi Kebijakan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (Silfitriana, 2016). Dengan demikian kajian kebijakan pendidikan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan dalam konteks efektivitas belum menjadi pembahasan secara khusus. Munculnya kebijakan tentu tidak terlepas dari diskusi serta pro-kontra. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah perlu ditelisik input, proses dan output yang dihasilkan. Jangan sampai kebijakan dikeluarkan hanya untuk menandakan hadirnya pemerintah tanpa memperdulikan proses dan hasil yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu secara khusus, artikel ini akan membahas mengenai efektivitas pelaksanaan kebijakan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan yang merupakan kebijakan khas dari Pemerintah Kabupaten Gowa.

Metode

Kabupaten Gowa merupakan salah satu daerah yang dinamis, dengan perjalanan sejarah yang panjang dengan proses kepemimpinan dan kemasyarakatan yang beragam dan serangkaian inovasi yang khas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe fenomenologi. Hasil dari kajian ini adalah deskriptif analitis. Bersifat deskriptif dikarenakan penelitian ini diarahkan untuk memperoleh gambaran yang jelas serta menyeluruh tentang efektivitas pelaksanaan Kebijakan Sistem Kerja Tuntas Berkualitas di Kabupaten Gowa. Bersifat analitis, dengan harapan selanjutnya akan melakukan analisis terhadap gambaran efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut.

Wawancara yang mendalam dan observasi langsung di lapangan dilakukan selama proses pengumpulan data. Wawancara dilakukan kepada stakeholder yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk memberikan informasi terkait masalah yang diteliti, yaitu pihak Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Gowa, Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa, Dewan Pendidikan Kabupaten Gowa, Pihak Sekolah baik tingkat SD, SMP, maupun SMA, serta Tokoh Masyarakat. Sedangkan observasi dilakukan dalam beberapa kali kegiatan yang berhubungan dengan Kebijakan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan. Analisis data dilaksanakan dengan cara melakukan analisis terhadap data hasil wawancara dan observasi. Proses pengambilan informasi dilakukan selama empat bulan mulai bulan Mei hingga Juli 2016. Sementara untuk menuntaskan proses Triangulasi data, maka dilakukan perpanjangan waktu hingga September 2016. Selain itu diadakan diskusi terarah dengan insan akademisi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar sebanyak 2 seri. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan ketepatan, kehandalan, dan daya kritis terhadap data yang telah diperoleh.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kebijakan yang efektif merupakan kunci sukses implementasi kegiatan organisasi pemerintahan. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya (Kurniawan, 2005). Dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, patut untuk diukur, sejauh mana tingkat efektivitas kebijakan

tersebut, agar secara bersamaan tidak terjadi kerugian Dalam melaksanakan program, perlu ada ukuran agar tujuan tercapai dengan tepat dan dapat menyusun perencanaan yang baik untuk hasil yang lebih berkualitas. Apalagi semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar efektivitas (Gedeian, 1991). Begitu pula sebaliknya, bila pencapaian tujuan pelaksanaan kebijakan kecil, maka efektivitasnya juga demikian. Sehingga terkesan ada kemubaziran ketika pelaksanaan evaluasi diadakan.

Sekolah dan politik tak dapat dipisahkan (Youdell, 2011). Pernyataan Youdell menegaskan keterlibatan massif Pemerintah Kabupaten Gowa dalam urusan pendidikan sekolah, utamanya pendidikan dasar 9 tahun. Dalam mengukur efektivitas pelaksanaan kebijakan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan di Kabupaten Gowa sebagai produk kebijakan pemerintah. Kebijakan yang disosialisasikan mulai tahun 2011, lalu dipertegas dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 tahun 2013 yang memosisikan kebijakan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan sebagai program Pemerintah Kabupaten Gowa yang khas, unik, dan unggul. Kebijakan ini menuntut efisiensi pelaksanaan kegiatan pendidikan, dan menghindari hal-hal yang dianggap tidak substantif untuk dilaksanakan. Efisiensi dan efektivitas sangat berkaitan erat.

Efisiensi adalah perbandingan antara input dan output(Mahmudi, 2007). Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini, efisiensi program tergambaran jelas mulai dari proses sosialisasi kebijakan. Pada tahap pemberian informasi terkait sistem kelas tuntas berkelanjutan tergambaran dimulai dengan sosialisasi program pada tahun 2011 dengan melakukan workshop dan seminar pendidikan. Pelaksanaan sosialisasi secara sigap direspon oleh 50 sekolah yang siap dijadikan sekolah percontohan pelaksanaan program Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan, dan pada tahun 2013 telah dipergunakan diseluruh sekolah Negeri dan Swasta di Kabupaten Gowa.

Anggaran pendidikan gratis yang menjadi program unggulan Pemerintah Kabupaten Gowa juga berhasil ditekan penggunaannya dengan dilaksanakannya kebijakan ini. Dalam sistem kelas tuntas berkelanjutan, ada yang dikenal dengan deteksi dini pada anak didik. Pada awal pembelajaran, strategi deteksi dini dilakukan untuk mengetahui, memahami dan memetakan potensi dan kompetensi siswa. Strategi ini tentu akan mewujudkan efisiensi anggaran, dikarenakan sejak awal sudah dapat diketahui informasi lengkap terkait peserta didik, sehingga

dapat meminimalisir terjadinya kesalahan dalam mendidik dan menjalankan proses *sharing knowledge* kepada mereka.

Dapat dibayangkan ketika, sejak awal tidak ada deteksi dini, maka proses belajar mengajar hanya dilakukan seperti biasa, tidak memiliki basis data, terkesan simbolis dan pemberian informasi dilakukan merata tanpa melihat terlebih dahulu kemampuan siswa, dan pada akhirnya kita hanya melahirkan lulusan yang tidak berkualitas hanya karena salah dalam pelaksanaan proses belajar mengajar.

Kejadian itu bisa berujung pada lebih besarnya pembiayaan dikemudian hari, dikarenakan ada biaya lanjutan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan beban daerah yang besar dikarenakan hadirnya lulusan yang tidak berkualitas berbanding lurus dengan bertambahnya pengangguran dari angkatan kerja. Pemaknaan tentang kecukupan yang berkenaan dengan seberapa jauh jarak tingkat efektivitas yang memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Dunn, 2003).

Dalam hal ini kebijakan sistem kelas tuntas berkualitas, seringkali memang ada masalah yang muncul. Pada awal pelaksanaan program, banyak guru yang mengeluh karena merasa ada beban berat yang dipikulnya. Namun lambat laun, ada penerimaan dari tanggung jawab tersebut, ada pencerahan yang diterima oleh guru terkait tanggung jawabnya sebagai pendidik dan pengajar. Hal ini memperjauh jarak antara pelaksanaan program dan masalah-masalah yang akan timbul dan memberi kepuasan, karena masalah-masalah tersebut dapat segera diselesaikan. Dunn (2003) menjelaskan bahwa kesetaraan dimaknai erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Keadilan dan kewajaran merupakan kunci dari kesetaraan. Klinik dini merupakan langkah taktis dalam pemberian bantuan belajar kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam mendapai standar kompetensi yang telah diterapkan.

Peserta didik tidak harus mengulangi kembali semua pelajaran yang ada, cukup dengan mengikuti klinik dini dan akan dibimbing hingga tuntas, untuk setiap pelajaran yang belum mencapai standar nilai. Program-program tersebut menggambarkan efisiensi waktu, tenaga, dan dana dengan tidak mengesampingkan hasil kuantitas yang banyak dan kualitas yang bereputasi. Program ini memberikan gambaran bahwa sesungguhnya tidak ada siswa yang payah atau tidak cerdas. Dengan program yang khas dan implementasi yang terukur, maka kita dapat mengubah

persepsi tersebut. Untuk mewujudkan kesetaraan, maka siswa yang belum tuntas pelajarannya akan digenjut agar dapat menyelesaikan pelajaran dengan baik, sehingga dapat mengejar siswa lainnya yang lebih dahulu menuntaskan pembelajaran tersebut.

Keberhasilan kebijakan dapat dilihat dari respon masyarakat. Responsivitas yang oleh Dunn (2003) difahami sebagai seberapa besar kebijakan yang ada dapat memberi kepuasan pada kebutuhan, preferensi, atau nilai kepada kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Dalam pelaksanaan kebijakan Sistem Kelas Tuntas Berkualitas, dirasakan sebagai hal yang memuaskan dan jarak antara kepuasan dan ancaman munculnya masalah sangat jauh. Program-program yang ditawarkan malah mendapatkan respon positif dari masyarakat. Dalam beberapa momen, ada beberapa pimpinan daerah yang belajar dari pengelolaan pendidikan di Kab. Gowa. Masyarakat merasa puas karena tidak ada siswa yang dinyatakan tinggal kelas, setiap anak didik bahkan didorong untuk dapat menuntaskan pembelajaran. Guru pun dituntut agar tidak cuek atau merasa masa bodoh dengan siswa yang belum tuntas, karena tanggung jawab guru di sekolah merupakan porsi utama dari program ini.

Guru dituntut kreatif dan menghasilkan alternatif proses pembelajaran yang baik dan tidak monoton sehingga peserta didik yang kurang mampu dalam pelajaran tertentu, dapat dibantu menuntaskan pembelajaran tersebut. Salah satu bentuk kreatifitas guru adalah bagaimana membuat kelas menjadi ramai dengan gagasan dan siswa dapat menjadi bagian penuh dari proses belajar mengajar. Tibalah kita pada titik temu efektivitas bahwa kebijakan yang inovatif dan kreatif perlu mendapatkan respon positif dari masyarakat, selain itu seluruh *stakeholder* terkait perlu memaksimalkan kerja dalam menyukseskan kebijakan pemerintah, utamanya dalam sektor pendidikan.

Kesimpulan

Sistem kelas tuntas berkelanjutan menjadi kebijakan unggulan Pemerintah Kabupaten Gowa. Inovasi di bidang pendidikan ini telah memberi dampak positif pada pembangunan kualitas manusia di daerah tersebut. Adanya program unggulan seperti deteksi dini, klinik dini, hingga sistem promosi menghadirkan tanggung jawab penuh guru terhadap siswa, tidak sekedar hanya memandang kemampuan awal peserta didik. Pemerintah daerah secara tegas mengambil peran dalam penyelesaian masalah pendidikan yang seringkali menjadi momok menakutkan

bagi masyarakat. Bahkan dengan kehadiran kebijakan ini, anggaran pendidikan mampu dimaksimal sebaik mungkin untuk kebutuhan-kebutuhan yang tepat sasaran. Output kebijakan yang telah dirasakan seperti munculnya kepuasan masyarakat, tanggung jawab guru yang terukur, penggunaan anggaran yang maksimal bahkan dapat ditekan dan menghasilkan lulusan didik yang berkualitas menjadi indikator efektivitas pelaksanaan kebijakan inovatif dan kreatif Pemerintah Kabupaten Gowa.

Daftar Pustaka

- Al-Samarrai, S. (2013). *Local Governance and Education Performance: a Survey of the Quality of Local Education Governance in 50 Indonesian Districts*. Human Development. Jakarta: World Bank.
- Basri, M. (2011). Budaya Mutu Dalam Pelayanan Pendidikan. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2).
- Dunn, W. N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gedeian, A. G. (1991). *Organization Theory and Design*. Denver: University of Colorado.
- Kurniawan, A. (2005). *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan.
- Langgulang, H. (1987). *Asas-asas Pendidikan Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Husna.
- Mahmudi, M. (2007). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Malik, I. (2011). Kebijakan Sertifikasi Guru (Tawaran Solusi Pendidikan Profesi Guru). *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1).
- Mustari, N. (2011). Implementasi Kebijakan Peningkatan Kompetensi Pendidik Melalui Peningkatan Rasio Pendidik & Pemerataan Penyebaran Pendidik di Kabupaten Jeneponto. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1).
- Purwanto, N. A. (2008). Pengaruh Politik Dalam Bidang Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 4(2).
- Sarnoto, A. Z. (2012). Konsepsi Politik Pendidikan di Indonesia. *Educhild*, 1(1).
- Silfitriana, M. (2016). *Evaluasi Kebijakan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) di Kabupaten Gowa*. Universitas Hasanuddin.
- Syamsuddin, M. M. (2015). *Inovasi Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Gowa (Studi Kasus Pelaksanaan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan di SD INPRES Cambaya)*. Universitas Hasanuddin.
- Youdell, D. (2011). *School Trouble: Identity, Power and Politics in Education*. Oxon: Routledge.